

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan secara umum menerangkan mekanisme atas diberikannya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, termasuk urusan pada bidang administrasi, politik dan ekonomi serta pengelolaan keuangan daerah. Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisiensi serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Pengelolaan keuangan daerah memiliki arti keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, tanggung jawab, dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah adalah adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan dengan memenuhi kaidah - kaidah yang berlaku agar dapat mencapai *good governance*, yakni pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. keleluasaan dalam membelanjakan APBD-nya. Oleh karena itu, daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber-sumber

PAD secara maksimal (Siswanto, et al, 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan ringkasan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi selama periode satu tahun anggaran, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk kapabilitas pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mencakup urusan pemerintah, pelayanan dan pembangunan yang dapat dilihat melalui dokumen APBD (Abdul, et al, 2012). Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD dan memberikan keleluasaan dalam membelanjakan APBD-nya. Oleh karena itu, daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber-sumber PAD secara maksimal. Salah satu keberhasilan dalam praktek otonomi daerah berasal dari kerja keras PEMDA dalam upaya melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum (Susilawati, et al, 2018).

Setiap akhir tahun pemerintah daerah akan membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 Pasal 2 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Siswanto & Maylani, 2022).

Menurut Hery, (2015) bahwa, keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan yang memuat tata cara perencanaan, penganggaran, pengelolaan kas daerah,

pelaporan keuangan, serta akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Menurut Susilowati bahwa, keuangan daerah adalah aktivitas keuangan yang terkait dengan pengelolaan, pengaturan, dan pengendalian penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

Menurut Yani, (2002) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010).

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan (Nordiawan & Hertianti, 2010).

Secara umum, pengukuran kinerja menunjukkan hasil dari implementasi sebuah kegiatan/ kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap tujuan dari kegiatan/kebijakan (Nordiawan & Hertianti, 2010).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki potensi ekonomi signifikan, pengelolaan keuangan

menjadi krusial untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik, sehingga dapat mengatasi berbagai tantangan dan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Hasil Survei yang dilakukan terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten TTS yaitu Pendapatan Asli menentukan derajat kemandirian, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat, dan kemampuan dalam mengelola serta menggali sumber PAD belum optimal. Hal ini menjadi fokus penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada tabel 1.1 data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukkan bahwa :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan**  
**(Dalam Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Dana Perimbangan	Kontribusi
2020	1,436,361,962,866.66	64,192,990,192.85	1,295,194,646,329.81	4.47%
2021	1,370,553,089,001.66	65,657,453,733.66	1,232,323,902,250.00	4.79%
2022	1,401,051,293,025.36	46,784,070,870.36	1,350,046,938,758.00	3.34%

Dari table diatas dilihat dari kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami flukstasi dimana pada tahun 2020 memberikan kontribusi Rp. 64.192.990.192 atau sekitar 4,47% terhadap pendapatan daerah, pada tahun 2021 mengalami peningkata menjadi Rp.65.657.453.733 atau sekitar 4,79% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan 3,34% disebabkan karena dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan yang cukup

tinggi. Dari data tersebut mengindikasikan masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap pemerintah pusat, kemampuan daerah untuk mengelolah dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal.

Kondisi keuangan dan kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara mencerminkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Maka dari itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diperlukan untuk melihat sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan.

Memberikan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam membantu mengambil keputusan terkait alokasi dana, pengelolaan keuangan, dan perencanaan keuangan dimasa yang akan datang.

2. Bagi Akademik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan di bidang Akuntansi Keuangan Daerah sebagai referensi penting bagi peneliti dan akademisi.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan acuan pada penelitian selanjutnya.